



JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 29 Juni 2024, Publish: 1 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu

Sophia Hipui¹

¹ Faculty of Administrative Science, University of Indonesia, veronikahipui@gmail.com

Corresponding Author: veronikahipui@gmail.com

Abstract: *Tourism is one sector that is receiving attention from the government to continue to be developed considering its potential contribution to the economy. Moreover, for Mahakam Ulu Regency, which in fact is a state border area, efforts are being made to explore its potential in the tourism sector with development measures. The hope is none other than to provide an increase in the standard of living for the people of Mahakam Ulu Regency. With the limitations of the regional government, the development of the tourism sector in Mahakam Ulu Regency is oriented towards collaborative governance mechanisms. This article aims to explain collaborative governance in developing the tourism sector in Mahakam Ulu Regency. To answer the research objectives, a qualitative approach was applied with data collected from various secondary sources. The results of the analysis show that collaborative governance in the development of the tourism sector in Mahakam Ulu Regency shows the participation of various actors such as the central government, regional government, community and private sector with the central government and regional government having a role in directing and empowering the resources they have which then have an impact in improving the standard of living of the community, the community is more oriented towards matters relating to community empowerment itself, and the private sector is expected to invest in advancing the tourism sector in Mahakam Ulu Regency. Among these four actors, the realization of collaborative governance will be seen if all of these actors create principles of engagement, shared motivation, and capacity for joint action.*

Keyword: *Collaborative Governance, Tourism Development, Border Areas.*

Abstrak: Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian dari pemerintah untuk terus dikembangkan mengingat potensi kontribusinya yang begitu besar terhadap perekonomian. Apalagi, bagi Kabupaten Mahakam Ulu yang notabene merupakan daerah perbatasan negara, sektor pariwisata diupayakan untuk digali potensinya dengan langkah-langkah pengembangan. Harapannya tidak lain untuk memberikan peningkatan taraf hidup bagi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu diorientasikan pada mekanisme tata kelola kolaboratif. Artikel ini bertujuan menjelaskan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, pendekatan kualitatif diaplikasikan dengan data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder. Hasil analisis

menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan adanya partisipasi berbagai aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran dalam mengarahkan dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki yang kemudian berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat, masyarakat lebih diorientasikan pada hal-hal yang menyangkut pemberdayaan masyarakat itu sendiri, dan swasta diharapkan untuk berinvestasi memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu. Diantara keempat aktor tersebut, perwujudan tata kelola kolaboratif akan terlihat jika kesemua aktor tersebut menciptakan *principle engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pengembangan Pariwisata, Daerah Perbatasan.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai banyak potensi yang dapat dimanfaatkan dan diolah karena dukungan sumber daya alam yang melimpah di berbagai wilayahnya. Selain itu Indonesia juga kaya akan peninggalan sejarah, adat istiadat, dan seni budaya daerah, dan panorama alam yang begitu indah sehingga tidak kalah menarik potensinya untuk dengan baik dikembangkan (Picard, 2018). Banyak tempat wisata di Indonesia yang dikenal oleh wisatawan mancanegara, selain tentunya dikenal oleh bangsanya sendiri. Industri pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia, yang telah lama mengalami peningkatan pendapatan dan lapangan kerja tahunan yang hampir konstan dan pesat (Kim dkk., 2012). Bagi suatu daerah, potensi daerah dapat dikembangkan sekaligus pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pertumbuhan perekonomian yang didorong oleh sektor pariwisata (Amir dkk., 2020). Sebagai negara yang mempunyai potensi wisata yang besar tentu menjadikan sektor pariwisata Indonesia menjadi sorotan.

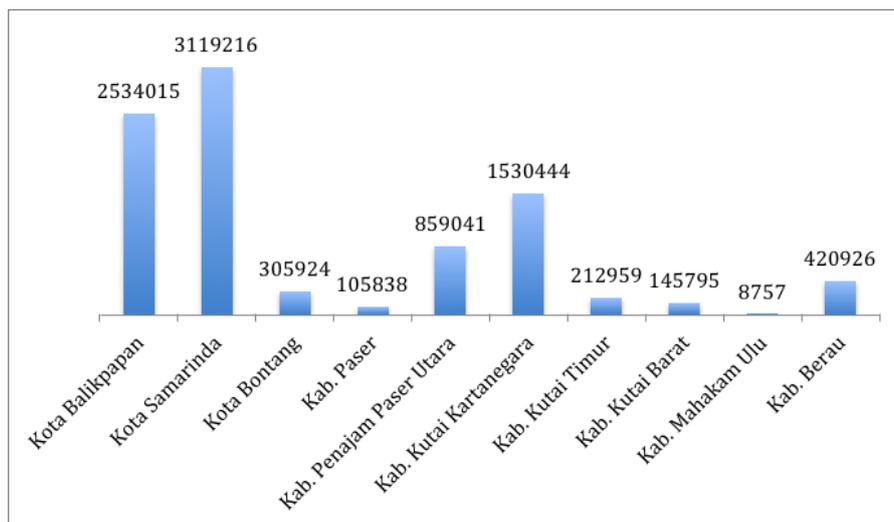
Pariwisata merupakan sektor unggulan dalam pembangunan suatu negara. Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi secara terus-menerus, dan telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling cepat berkembang di dunia (Tolkach & King, 2015). Pembangunan pariwisata menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan, berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat, dan melindungi sumber daya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan (Tien dkk., 2019).

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan devisa negara dan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sebagai sumber devisa negara, pariwisata mempunyai potensi yang sangat besar. Keberadaan tempat wisata juga memberikan dampak positif terhadap upaya perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya. Pembangunan pariwisata merupakan suatu upaya perencanaan pembangunan yang menyediakan daya tarik daerah dan menjadi daya tarik yang dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.

Di era otonomi daerah, urusan pariwisata menjadi salah satu kewenangan yang dipegang oleh pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan arah pembangunan perekonomiannya masing-masing, termasuk sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor penting dalam mendukung pembangunan daerah otonom, khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kuswandi, 2020). Oleh karena itu, pengembangan dan pengembangan kawasan pariwisata yang menjadi tujuan destinasi wisata unggulan menjadi agenda penting dalam pembangunan daerah di berbagai daerah yang mempunyai potensi wisata alam, budaya, religi, dan kuliner (Yasintha, 2020).

Pengembangan sektor pariwisata juga menjadi salah satu perhatian dari Kabupaten Mahakam Ulu yang notabene sebagai daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Bukan tanpa alasan, dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, kunjungan

wisatawan ke Kabupaten Mahakam Ulu tergolong yang paling rendah. Pada tahun 2023, kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Mahakam Ulu hanya sebanyak 8.757 orang atau terendah se-provinsi Kalimantan Timur (lihat Gambar 1).



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Berbagai upaya dicanangkan dalam rangka mendongkrak potensi sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu. Keterlibatan berbagai pihak menjadi hal yang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu, selain pihaknya sendiri, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengharapkan partisipasi swasta dan masyarakat untuk mengembangkan sektor pariwisata. Atas dasar itu, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu.

METODE

Artikel ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif. Datadata dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder. Artikel ini lebih berorientasi pada penelaahan literatur. Berbagai data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan jenisnya, artikel ini mengaplikasikan sebuah penelitian deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang menjadi tujuan dari penulisan artikel ini, yaitu menjelaskan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tata kelola kolaboratif telah berkembang sebagai solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang berada di luar kapasitas manajerial satu departemen, yang mana berbagai pemangku kepentingan diundang untuk berkolaborasi dalam aktivitas pemerintahan sehingga menghasilkan kebijakan, model, atau tindakan nyata. Siapa pun dari organisasi pemerintah, sektor swasta, aktor lokal, institusi akademis, dan masyarakat dapat dilibatkan dalam menguatkan kemungkinan solusi potensial (Ansell & Gash, 2007; Cho dkk., 2019; Emerson, 2018).

Tata kelola kolaboratif telah muncul sebagai sebuah konsep untuk menyatukan pemangku kepentingan swasta dan publik untuk terlibat dalam arah yang sama guna menetapkan tujuan bersama (Ansell & Gash, 2007). Setidaknya ada dua konsep *Collaborative Governance* yang paling berpengaruh. Konsep pertama, dari Ansell & Gash (2007), mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai “suatu pengaturan pemerintahan di

mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Ini terdiri dari proses pengambilan keputusan formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.” Oleh karena itu, menurut definisi ini, tata kelola kolaboratif diusulkan sebagai sebuah konsep berbeda yang berfokus pada isu-isu dan kebijakan publik. Proses kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2007) terdiri dari pembangunan kepercayaan, proses komitmen, pemahaman bersama, hasil antara, dan dialog tatap muka. Namun, Ansell dan Gash (2007) menyebutkan bahwa proses berulang dalam proses kolaboratif sulit untuk dipahami, karena prosesnya bersifat siklus dan bukan linier.

Konsep kedua, dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai proses dan struktur kebijakan publik sebagai pengambilan keputusan dan manajemen. Kedua aspek ini melibatkan masyarakat secara konstruktif di seluruh lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan ranah publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai. Ciri utama dari konsep yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) adalah cakupan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk masyarakat/lokal dan organisasi berbasis masyarakat dalam kelompok pemangku kepentingan. Mengikuti konsep dalam proses kolaboratif, dinamika kolektif menunjukkan kolaborasi siklis daripada karakteristik aliran linier. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menyebutkan proses interaktif dalam proses kolaborasi lebih kompleks sehingga proses berulang lebih cocok. Dinamika kolaboratif terdiri dari keterlibatan prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak bersama.

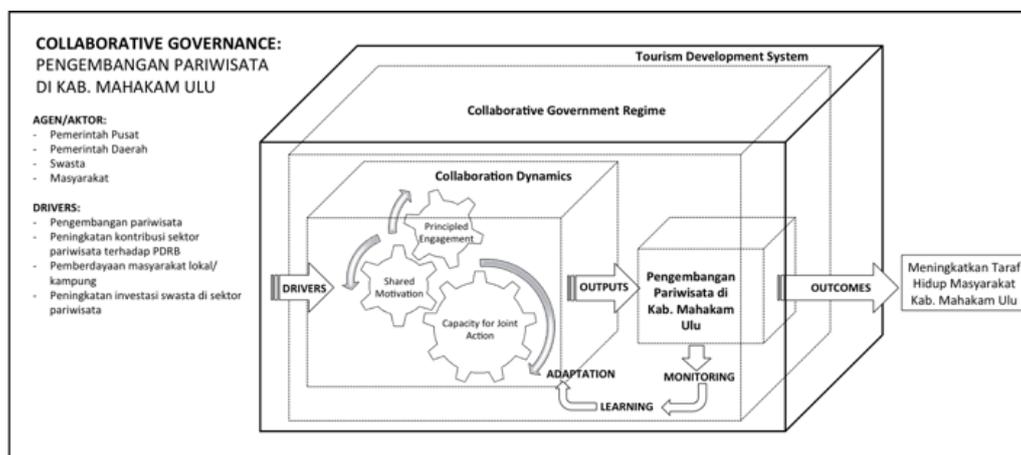
Tata kelola kolaboratif dalam konteks pariwisata berkaitan dengan perubahan dan tantangan dalam pengembangan objek wisata yang memberikan manfaat bagi banyak pemangku kepentingan dalam skema pengembangan masyarakat (Keyim, 2018). Meskipun banyak penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah mempunyai peran sentral dalam kolaborasi, banyak penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat lokal sangat penting dalam tata kelola pariwisata kolaboratif. Robertson (2011) menyebutkan bahwa pendekatan pengembangan pariwisata berorientasi lokal terutama tertarik pada keberlanjutan pariwisata jangka panjang. Untuk meningkatkan program terkait, pemerintah harus merumuskan desain kelembagaan yang tepat untuk memfasilitasi kolaborasi sebagai lembaga pengatur utama. Desain kelembagaan harus mengikuti kebutuhan pemangku kepentingan terkait untuk merancang dan mengembangkan destinasi, menumbuhkan komitmen yang berharga, dan mensinergikan nilai kolaboratif (Barandiarán, Restrepo, & Luna, 2019; Bichler & Löscher, 2019). Dengan menetapkan desain kelembagaan yang tepat dan mendukung platform kolaboratif, proses kolaboratif dalam dinamika kolektif akan menghasilkan konsensus dalam menetapkan dan mencapai tujuan bersama (Barandiarán, Restrepo, & Luna, 2019).

Pembahasan

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor pariwisata menjadi hal yang terus mendapat perhatian serta pengkajian Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan memiliki keragaman potensi pariwisata mulai dari adat istiadat, tradisi, budaya, dan tentunya wisata alam terutama yang khas dimiliki oleh masyarakat Dayak Mahakam Ulu. Untuk mengawali pengembangan berbagai potensi wisata tersebut, kawasan Batoq Tenevang di Kampung Long Melaham saat ini sedang disiapkan sebagai ikon pariwisata Mahakam Ulu. Rencananya, pengembangan akan dilakukan secara bertahap sehingga Batoq Tenevang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana serta destinasi yang dapat menampilkan berbagai macam hal yang dapat dinikmati pengunjung mulai dari lamin adat, MICE, *culture stage*, museum, kolam renang, hingga bungalow yang memiliki ciri khas Mahakam Ulu. Tentunya, karena ingin menunjukkan ciri

khas Mahakam Ulu, maka latar belakang dari kawasan wisata ini adalah Batoq Tenevang itu sendiri.

Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengarahkan pengembangan sektor pariwisata dikelola dengan cara tata kelola kolaboratif. Setidaknya, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengarahkan masyarakat lokal dan swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor pariwisata. Apabila disederhanakan, mekanisme tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Mekanisme Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu

Aktor pertama yang terlibat tentunya adalah pemerintah pusat. Meskipun kewenangan mengurus sektor pariwisata berada di bawah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, pemerintah pusat tetap memiliki kepentingan dan peran sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam mekanisme tata kelola kolaboratif tersebut. Bagi pemerintah pusat, salah satu primadona kebanggaan Indonesia adalah sektor pariwisata. Wisatawan dari berbagai pelosok belahan dunia akan datang dengan adanya ketersediaan sumber daya pariwisata yang berlimpah. Peranan sektor pariwisata nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Perekonomian nasional disumbang secara krusial salah satunya melalui pariwisata karena mampu mendatangkan pendapatan daerah, penyerapan investasi dan tenaga kerja, peningkatan devisa, dan peningkatan usaha dapat menjadi lebih berkembang di berbagai wilayah yang ada di Indonesia.

Untuk meraih berbagai manfaat dari pengembangan sektor pariwisata, pemerintah pusat menekankan perhatian untuk meningkatkan daya saing pariwisata termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu. Pasalnya, meskipun dalam laporan terakhir “The Travel & Tourism Competitiveness Report” yang dirilis *World Economic Forum*, Indonesia mengalami kenaikan peringkat pada tahun 2021 menjadi peringkat 32 dari 117 negara dalam hal indeks daya saing pariwisata, namun pilar-pilar seperti *Healthy and Hygiene* (kesehatan dan kebersihan), *Safety and Security* (keselamatan dan keamanan), *Environmental Sustainability* (keberlanjutan lingkungan), dan *Tourist Service Infrastructure* (infrastruktur pelayanan wisatawan) masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itulah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap menjadi salah satu aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu.

Berikutnya, aktor kedua yang sebetulnya memiliki peranan paling vital dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu itu sendiri. *Outcomes* yang diharapkan dari adanya tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan cita-cita dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu itu sendiri. *Outcomes* yang tertera dalam Gambar 2

merupakan salah satu dari empat misi pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu. Misi tersebut adalah “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam, Memberdayakan Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah yang berbasis Kerakyatan, dan Perluasan Lapangan Kerja termasuk Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Pariwisata dan Kearifan Lokal”. Salah satu sasaran utama dari misi tersebut dan merupakan output dari yang tertera pada Gambar 2 adalah pengembangan pariwisata.

Dalam mengefektifkan *output* dan *outcomes* pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu, guna meningkatkan kualitas produk dan pelayanan wisata, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) memberikan prioritas langkah dalam mendorong pariwisata melalui pembinaan bidang sumber daya manusia. Pihak Disparpora meyakini bahwa kualitas layanan dan produk wisata sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sehingga di tengah semakin kompetitifnya persaingan global maka peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci dalam aksi untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu.

Aktor ketiga adalah masyarakat. Merujuk program prioritas Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang salah satunya berada pada upaya pengembangan sektor pariwisata, nuansa yang ingin dihadirkan terkait pariwisata di Mahakam Ulu adalah wisata budaya berbasis kearifan lokal dan destinasi ekowisata. Masyarakat diharapkan menjadi salah satu aktor yang berperan dengan nuansa atau konsep pengembangan pariwisata demikian. Bupati Mahakam Ulu memberikan himbauan kepada Pemerintah Kampung untuk berpartisipasi dalam mekanisme tata kelola kolaboratif pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam salah satu kesempatan, Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, menyatakan: “*Saya menghimbau kepada Pemerintah Kampung untuk turut serta dalam mengembangkan kepariwisataan melalui program-program usulan pembangunan untuk mengembangkan destinasi wisata, event-event budaya dan pengembangan sumber daya masyarakat di bidang pariwisata melalui penganggaran kampung.*”

Peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu juga dilakukan melalui keterlibatan dari kelompok sadar wisata yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Bahkan, keterlibatan dari kelompok sadar wisata ini menjadi perhatian sendiri dari Bupati Mahakam Ulu. Bupati Mahakam Ulu menyatakan: “Saat ini kita masih merintis perkembangan objek wisata, oleh karena itu saya meminta kepada Kepala Disparpora untuk melakukan pembinaan kepada kelompok sadar wisata guna mempercepat pengembangan objek wisata yang sudah ada, karena kelompok sadar wisata ini akan menjadi motor penggerak dalam mengembangkan dan mengelola objek-objek wisata sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mahulu.”

Aktor keempat adalah swasta. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengharapkan partisipasi swasta sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu. Terlebih, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyadari keterbatasan yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata tersebut. Bupati Mahakam Ulu menekankan pentingnya swasta dalam pengembangan sektor pariwisata ini dengan menyatakan: “Investasi dari pihak swasta akan membantu kita dalam membangun infrastruktur pariwisata yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan swasta juga dapat turut serta dalam pengembangan wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan. Kita dapat bersama-sama menciptakan destinasi yang memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung.”

Untuk melaksanakan sebuah tata kelola kolaboratif, diperlukan *drivers* atau pemantik mengapa suatu kolaborasi perlu dilakukan. Dalam konteks ini, terdapat *drivers* berupa pengembangan pariwisata, peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemberdayaan masyarakat lokal/kampung, dan peningkatan investasi swasta di sektor pariwisata. Dengan adanya *drivers* tersebut, agen/aktor terkait yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta akan saling

berkolaborasi untuk menghasilkan *output* berupa berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu. Diantara agen/aktor tersebut harus tercipta 3 (tiga) hal, yaitu *principle engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*.

Principle enagement terjadi dari waktu ke waktu dan dapat mencakup pemangku kepentingan yang berbeda pada titik yang berbeda dan berlangsung dalam format tatap muka atau virtual, jaringan lintas organisasi, atau pertemuan pribadi dan publik. Dengan adanya *principle enagement*, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta akan bekerja melintasi batas kelembagaan, sektoral, atau yurisdiksi masing-masing untuk memecahkan masalah, menyelesaikan konflik, atau menciptakan nilai. Kemudian, *shared motivation* bermakna penguatan diri yang terdiri dari empat elemen: saling percaya, pengertian, legitimasi internal, dan komitmen. Setelah itu terdapat aksi bersama (*capacity for joint action*) yang melibatkan dan memerlukan (1) pengaturan prosedural dan kelembagaan, (2) kepemimpinan, (3) pengetahuan, dan (4) sumber daya untuk menghasilkan output bersama. Dalam prosesnya diperlukan monitoring yang dapat memberikan pembelajaran (*learning*) sehingga dapat diadaptasi dalam kolaborasi yang dilakukan.

KESIMPULAN

Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan adanya partisipasi berbagai aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Masing-masing aktor memiliki perannya masing-masing dalam kapasitasnya untuk melakukan kolaborasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran dalam mengarahkan dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki sehingga sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dikembangkan yang kemudian berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut, peran serta dari masyarakat dan swasta sangat diperlukan. Masyarakat lebih diorientasikan pada hal-hal yang menyangkut pemberdayaan masyarakat itu sendiri, sementara swasta diharapkan untuk berinvestasi memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu. Diantara keempat aktor tersebut, perwujudan tata kelola kolaboratif akan terlihat jika kesemua aktor tersebut menciptakan *principle engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*.

REFERENSI

- Amir, A., Taufan, D. ., & Fauzi, R. (2020). Identifying Potential and Development Status of Tourism Village Development in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 42(8), 84–98.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Barandiarán, X., Restrepo, N., & Luna, Á. (2019). Collaborative governance in tourism: lessons from Etorkizuna Eraikiz in the Basque Country, Spain. *Tourism Review*, 74(4), 902-914.
- Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). Collaborative governance in tourism: Empirical insights into a community-oriented destination. *Sustainability*, 11(23), 6673.
- Cho, B. S., Lee, J., Lee, W., & Min, H. (2019). Changing management strategies of a government-hosted festival: The case of Hi Seoul Festival, South Korea. *International Journal of Event and Festival Management*, 10(2), 174-188.
- Emerson, K. (2018). Collaborative governance of public health in low-and middle-income countries: lessons from research in public administration. *BMJ Global Health*, 3(Suppl 4), e000381.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.

- Keyim, P. (2018). Tourism collaborative governance and rural community development in Finland: The Case of Vuonismahti. *Journal of travel research*, 57(4), 483-494.
- Kim, K., Uysal, M., & Sirgy, M. J. (2013). How does tourism in a community impact the quality of life of community residents?. *Tourism management*, 36, 527-540.
- Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 90-113.
- Picard, M. (2018). 'Cultural tourism' in Bali: National integration and regional differentiation 1. In *Tourism in South-East Asia* (pp. 71-98). Routledge.
- Robertson, P. J. (2011). An assessment of collaborative governance in a network for sustainable tourism: the case of RedeTuris. *International Journal of Public Administration*, 34(5), 279-290.
- Tien, N. H., Thai, T. M., Hau, T. H., Vinh, P. T., & Long, N. V. T. (2019). Solutions for Tuyen Quang and Binh Phuoc tourism industry sustainable development. Comparative analysis. *International Journal of Research in Marketing Management and Sales*, 2(1), 101-107.
- Tolkach, D., & King, B. (2015). Strengthening Community-Based Tourism in a new resource-based island nation: Why and how?. *Tourism Management*, 48, 386-398.
- Yasinta, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1-23.